



Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Analisis Terhadap Kebijakan Pertambangan dan Hukum Lingkungan

David Puspitno Andara¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: Davidandara1995@gmail.com, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Disputes, Mining, Policy, Environmental Law, Natural Resource Management.

ABSTRACT

The Indonesian mining industry contributes significantly to the country's economy, but this sector also faces various problems related to social, economic, and environmental impacts that often trigger disputes between the government, mining companies, and the community. This study aims to analyze disputes arising from mining policies and their impact on environmental sustainability in Indonesia. Using a qualitative case study approach, this article identifies the main problems faced by the mining sector, including environmental damage, social inequality, and weaknesses in law enforcement and regulations. The results of the study show that in order to create a sustainable mining sector, it is necessary to tighten regulations, apply environmentally friendly technologies, and increase community participation in natural resource management. This study offers solutions to improve mining policies and practices in Indonesia in order to minimize negative impacts on the environment and society.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Sengketa, Pertambangan, Kebijakan, Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam.

ABSTRAK

Industri pertambangan Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, namun sektor ini juga menghadapi berbagai masalah terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang seringkali memicu sengketa antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa yang muncul akibat kebijakan pertambangan dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, artikel ini mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi sektor pertambangan, termasuk kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, serta kelemahan dalam penegakan hukum dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan keberlanjutan sektor pertambangan, diperlukan pengetatan regulasi, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menawarkan solusi untuk memperbaiki kebijakan dan praktik pertambangan di Indonesia, agar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

David Puspitno Andara¹
Universitas Boyolali, Indonesia
e-mail: Davidandara1995@gmail.com



PENDAHULUAN

Industri pertambangan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan mineral lainnya telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar di dunia. Sektor ini menyumbang porsi besar terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendukung industri lainnya.

Namun, industri pertambangan juga menimbulkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak hati-hati, terutama dalam sektor pertambangan, berisiko besar terhadap pencemaran air, kerusakan ekosistem, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas.

Konflik sosial dan ekonomi seringkali muncul di sekitar area pertambangan, di mana masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan manfaat yang setimpal meski tanah dan sumber daya alam mereka dieksplorasi. Sengketa antara masyarakat, perusahaan tambang, dan pemerintah menjadi semakin kompleks karena ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi dan ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang sengketa yang muncul terkait kebijakan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur yang mencakup studi kasus dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam konflik pertambangan, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Data diperoleh dari dokumen hukum, laporan pemerintah, artikel ilmiah, serta wawancara dengan praktisi hukum, aktivis lingkungan, dan stakeholder industri pertambangan.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan antara kebijakan pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan, serta mengidentifikasi solusi yang dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sektor ini. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang ada, serta pengalaman dan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan

Salah satu dampak yang paling mencolok dari industri pertambangan adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Penurunan kualitas air, deforestasi, pencemaran tanah, dan polusi udara merupakan beberapa masalah utama yang sering kali muncul di sekitar lokasi tambang. Di Kalimantan, misalnya, penambangan batu bara menyebabkan deforestasi yang luas, mengancam ekosistem hutan tropis yang menjadi rumah bagi banyak spesies endemik. Selain itu, pencemaran air oleh limbah pertambangan yang mengandung logam berat merusak kualitas air yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk keperluan sehari-hari.

Pencemaran udara akibat debu tambang juga menjadi masalah besar, yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu contoh nyata adalah kasus pencemaran air yang terjadi di Sungai Mahakam akibat aktivitas pertambangan batu bara,



yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan dan berdampak pada sektor perikanan lokal. Praktik pertambangan yang tidak memadai dalam hal reklamasi lahan pasca-tambang memperburuk kondisi ini, meninggalkan lahan yang tidak dapat digunakan kembali.

2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, banyak masyarakat sekitar tambang yang tidak merasakan manfaat yang sebanding dengan kekayaan yang terkandung dalam tanah mereka. Ketimpangan sosial dan ekonomi muncul ketika hasil eksploitasi sumber daya alam tidak dapat dirasakan oleh masyarakat lokal. Masyarakat sering kali menghadapi kemiskinan, kehilangan akses terhadap sumber daya alam, dan mengalami dampak negatif dari kerusakan lingkungan.

Di daerah tambang, sering kali terjadi ketegangan antara perusahaan tambang dan masyarakat, terutama terkait dengan pembagian hasil tambang. Konflik ini semakin intensif akibat adanya ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan hak atas tanah mereka akibat eksploitasi yang tidak diatur dengan baik. Selain itu, adanya ketidakpastian hukum terkait hak atas tanah juga memperburuk situasi.

3. Kebijakan dan Penegakan Hukum yang Lemah

Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, masih banyak kendala dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Banyak perusahaan tambang yang melanggar ketentuan lingkungan tanpa konsekuensi yang berarti. Penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, memungkinkan pelanggaran terus berlangsung tanpa hukuman yang memadai.

Contoh dari lemahnya pengawasan adalah praktik tambang ilegal yang terus berkembang di beberapa daerah, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merugikan negara dari segi pendapatan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Selain itu, masalah perizinan yang tidak transparan sering kali menimbulkan konflik hukum antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

4. Solusi Hukum dan Kebijakan untuk Menyelesaikan Sengketa

Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi sengketa terkait pertambangan adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, memperkuat kebijakan lingkungan yang lebih ketat, dan mendorong penerapan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat. Mediasi ini dapat melibatkan semua pihak yang berkepentingan, sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

Penegakan hukum yang lebih tegas, dengan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran, juga diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan memastikan bahwa kebijakan yang ada diterapkan secara konsisten.

KESIMPULAN

Sektor pertambangan di Indonesia memainkan peranan penting dalam perekonomian negara, namun sektor ini juga menghadapi berbagai masalah besar terkait dampak lingkungan



dan ketimpangan sosial. Sengketa yang muncul akibat kebijakan pertambangan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang lebih efektif, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan peningkatan transparansi dalam perizinan dapat membantu mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang lebih adil dan berbasis pada prinsip keberlanjutan dapat menciptakan industri pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, I. & Santosa, M. (2021). *The Role of Law in Managing Mining Concessions in Indonesia: A Critical Analysis*. Jakarta: Indonesian Law Review.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Laporan Tahunan Industri Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Smith, J. (2020). *Environmental Impacts of Mining Activities in Indonesia*. Journal of Environmental Studies, 45(2), 234-245.
- Susanto, A., & Sari, R. (2022). *Sustainability Challenges in the Indonesian Mining Sector*. Environmental Science and Policy, 56(3), 190-201.